

Digitalisasi Akuntansi Berbasis Techtrend Sebagai Upaya Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Zalfa Khayliz Leviratna Arif^{1*}, Nuventin Asna Putri², Rizky Anissa Rahmadhanti Salim³, Shavira Dyah Pitaloka⁴, Dhika Maha Putri⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Malang

*zalfa.khayliz.1904226@students.um.ac.id

Abstrak

Pengendalian internal mempunyai peran untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik yang diukur dengan prinsip Good Government Governance (GCG). Kehadiran teknologi informasi dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan sesuai dengan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mewajibkan pengembangan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam upayanya. Tujuan studi ini adalah untuk memaparkan mengenai urgensi dari pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam lingkup instansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi untuk akuntansi pemerintah bisa diterapkan melalui sistem informasi akuntansi pemerintah atau biasa disebut dengan techtrend. Penerapan techtrend ini sangat diperlukan, sehingga akuntansi pemerintahan bisa diterapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan, meminimalisir terjadinya fraud, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian ini merupakan studi literatur, yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk menggali data dan informasi tentang isu dan topik-topik terbaru. Pada penelitian ini ditetapkan bahwa sumber informasi berasal dari hasil penelitian terkait digitalisasi untuk Good Corporate Governance yang diambil dari berbagai situs jurnal, berita, dan peraturan perundang-undangan yang berfokus pada Pemerintah Kabupaten Kediri. Hasil dan pembahasan disajikan dari sudut pandang tata kelola, techtrend, serta analisis SWOT atas penerapan digitalisasi akuntansi. Dari hasil yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan techtrend sebagai sistem informasi keuangan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Kediri dengan perlu adanya evaluasi lebih lanjut terhadap kekurangan dan kelemahannya.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Techtrend, Fraud*

Abstract

Internal control has a role to implement good governance as measured by the principles of Good Government Governance (GCG). The presence of information technology can improve governance in accordance with PP no. 56 of 2005 concerning the Regional Financial Information System which requires the development and utilization of information technology advances in its efforts. The purpose of this study is to describe the urgency of optimizing the use of information technology to produce quality financial reports. Within the scope of government agencies, the use of information technology for government accounting can be applied through a government accounting information system or commonly referred to as techtrend. The application of this techtrend is very necessary, so that government accounting can be applied according to the standards set, minimize the occurrence of fraud, and improve the quality of the financial reports produced. This research is a literature study, namely research conducted to explore data and information about the latest issues and topics. In this study, it was determined that the source of information came from the results of research related to digitization for Good Corporate Governance taken from various journal sites, news, and laws and regulations that focused on the Kediri Regency Government. The results and discussion are presented from the point of view of governance, techtrend, and SWOT analysis on the application of accounting digitization. From the results found, it can be concluded that the

use of techtrend as a financial information system can improve the governance of Kediri Regency with the need for further evaluation of its shortcomings and weaknesses.

Keywords: *Good Corporate Governance, Techtrend, Fraud*

PENDAHULUAN

Kasus kecurangan (fraud) di pemerintahan yang sangat tinggi menjadi isu yang fenomenal (Kalau & Leksair, 2020). Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisi fraud sebagai perbuatan seseorang yang merugikan melalui penyalahgunaan yang disengaja atau penyalahgunaan penggunaan aset atau sumber daya organisasi. Kecurangan yang terjadi merupakan akibat dari lemahnya sistem pengendalian internal. Dalam hal ini, pengendalian internal mempunyai peran untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (Eko Sudarmanto, 2020).

Tata kelola pemerintahan (Good Government Governance) merupakan tolak ukur untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik. Dalam rangka mewujudkan Good Government Governance (GGG), pengelolaan keuangan dilakukan dengan menerapkan 4 prinsipnya yaitu: keadilan (fairness), transparansi (transparency), dapat dikontrol (accountability), tanggungjawab (responsibility) (Manossoh, 2015). Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengungkapkan segala kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya publik kepada pihak yang berkepentingan (Rahmawati et al., 2018). Pengungkapan laporan pertanggungjawaban pemerintah berupa laporan keuangan (Nurillah & Muid, 2014).

Kehadiran teknologi informasi dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan (Marlina et al., 2021). Teknologi informasi merupakan suatu hal yang penting dan tidak terpisahkan dari berbagai macam aktivitas di pemerintah. Hal ini sesuai dengan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan, dan mendistribusikan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Beberapa penelitian mengenai fraud, GGG dan teknologi informasi telah dilakukan. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan fraud (Adelin, 2013). Semakin tinggi tingkat efektivitas pengendalian internal maka akan mampu menurunkan kecenderungan terjadinya fraud. Sebaliknya, jika sistem pengendalian internal lemah membuat seseorang tidak takut untuk melakukan tindakan yang merugikan organisasi. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya fraud di pemerintah, diperlukan sebuah sistem pengendalian internal yang baik. Salah satu cara yang digunakan manajemen dalam mengefektifkan aktivitas pengendalian intern adalah pengolahan informasi (Kurniawan, 2013). Aktivitas ini bisa dilakukan dengan mudah melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Oleh karena itu, tujuan studi ini adalah untuk memaparkan mengenai urgensi dari pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini karena teknologi mampu membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (Nurillah & Muid, 2014). Dalam lingkup instansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi untuk akuntansi pemerintah bisa diterapkan melalui sistem informasi akuntansi pemerintah atau biasa disebut dengan techtrend. Penerapan techtrend ini sangat diperlukan, sehingga akuntansi pemerintahan bisa diterapkan sesuai dengan standart

yang ditetapkan. Selain itu, techtrend merupakan bentuk dari sistem pengendalian intern pemerintah guna meminimalisir terjadinya fraud dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Good Corporate Governance

Terdapat beberapa pengertian GCG sendiri menurut ahli. Menurut Forum Tata Kelola Perusahaan di Indonesia, Good Corporate Governance diartikan sebagai susunan aturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengelola, para kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pihak berkepentingan secara internal maupun eksternal, corporate governance dapat diartikan sebagai sistem pengatur yang mengendalikan perusahaan (Prasinta, 2012; Retno & Priantinah, 2012). Menurut Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Tata Kelola, GCG adalah sekelompok hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Tata kelola perusahaan digunakan sebagai sebuah struktur untuk mencapai tujuan dengan pengawasan atas kinerja perusahaan.

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan bentuk strategi yang digunakan oleh stakeholder, pemegang saham, komisaris, dan manajer untuk menetapkan tujuan perusahaan dan cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan juga untuk mengawasi kinerja. Secara garis besar GCG merupakan sebuah struktur yang melibatkan berbagai pihak untuk menghasilkan tata kelola perusahaan yang baik dan mencapai tujuan perusahaan (Andypratama & Mustamu, 2013).

Dalam pelaksanaan Good Corporate Governance pada sebuah perusahaan dibutuhkan prinsip-prinsip sehingga dapat dilaksanakan dengan baik (Andypratama & Mustamu, 2013) terdapat lima prinsip dalam CGC yakni

A. Transparansi (Transparency)

Organisasi harus menyediakan informasi yang material dan relevan juga mudah dipahami oleh pemangku kepentingan untuk menjaga objektivitas. Organisasi harus memberikan keterbukaan informasi baik ketika terjadinya masalah yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan maupun hal penting lainnya yang sekiranya mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemegang shareholder, para kreditur dan pemangku kepentingan. Dalam menilai transparansi digunakan indikator informasi dan kebijakan organisasi (Andypratama & Mustamu, 2013; Kaihatu, 2006)

B. Akuntabilitas (Accountability)

Organisasi harus bertanggung jawab atas kinerja sesuai dengan visi, misi, dan tujuan secara transparan dan wajar, sehingga organisasi harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pihak-pihak terkait. Dengan akuntabilitas yang baik akan tercapai kinerja yang berkesinambungan. Untuk menilai akuntabilitas sebuah organisasi dapat dilihat dari basis kerja dan audit (Andypratama & Mustamu, 2013; Anggayana & Wirajaya, 2019; Kaihatu, 2006).

C. Responsibilitas

Organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku juga melaksanakan kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungan hingga terciptanya keberlanjutan usaha dan mendapatkan pengakuan sebagai Good corporate Citizen (Andypratama & Mustamu, 2013; Kaihatu, 2006).

D. Independensi

Organisasi harus dikelola secara independen tanpa ketergantungan dengan pihak lain dan keputusan yang diambil bukan merupakan intervensi pihak lain. Indikator dalam menilai independensi sebuah organisasi adalah pengaruh internal dan pengaruh eksternal (Andypratama & Mustamu, 2013).

E. Kewajaran

Untuk memenuhi prinsip kewajaran maka dalam pelaksanaan kegiatan organisasi harus selalu memperhatikan kepentingan shareholder dan pemangku kepentingan lainnya dan semua individu yang terlibat di dalamnya. Indikator yang digunakan dalam menilai prinsip kewajaran sebuah organisasi adalah shareholder dan stakeholder (Andypratama & Mustamu, 2013; Anggayana & Wirajaya, 2019). Dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG yang baik dalam sebuah organisasi maka diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga mengoptimalkan kinerja. Kinerja merupakan suatu gambaran mengenai taraf pencapaian implementasi suatu kegiatan organisasi dalam mewujudkan tujuan, visi, misi, dan sasaran suatu organisasi (Anggayana & Wirajaya, 2019).

Kelola pada Instansi Pemerintahan

Tata kelola Pemerintahan merupakan strategi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kinerjanya. Kinerja pemerintah dapat dilihat dalam bentuk pelayanan publik, respon anggaran, capaian hasil, dan Indeks Pembangunan Manusia. Organisasi pemerintahan merupakan salah satu jenis organisasi sektor publik yang memiliki tujuan utama melayani dan menyejahterakan masyarakat dalam bidang tertentu (IPM) (Muslih et al., 2021).

Tata kelola pemerintahan merupakan kesepakatan yang dicapai pemerintah yang baik dan bertanggung jawab. Penerapan tata kelola yang baik sesuai prinsip akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan dan menghimpun kekuatan kearifan lokalnya (Taufik et al., 2019).

Menurut penelitian Muslih et al., 2021 tata kelola pemerintah khususnya pemerintah daerah berpengaruh positif kepada kinerja pemerintah daerah, peningkatan kualitas implementasi tata kelola pemerintah akan meningkatkan kinerja perusahaan, sesuai dengan teori tingkat implementasi tata kelola berpengaruh positif kepada kinerja pemerintahan. Tata kelola yang dibangun oleh pemerintah daerah meningkatkan pencapaian goal pembangunan di daerah. Secara konseptual, tata kelola meningkatkan komitmen dan aturan-aturan main instansi dan mendorong aplikasinya sehingga akan menaikkan capaian tujuan-tujuan pembangunan daerah, yakni tujuan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IT Governance dan Penerapan IT

Dengan perkembangan teknologi yang merambah di segala lini kehidupan berdampak pula pada aplikasi dan implementasi teknologi yang semakin merata di seluruh wilayah Penggunaan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh institusi pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam instansi pemerintah (e-governance) akan membangun efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan dikembangkannya e-government akan memperbaiki penataan dalam sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan pemanfaatan teknologi informasi (Sofa et al., 2020).

IT governance merupakan sebuah struktur dari hubungan dan proses untuk memandu dan mengarahkan sebuah perusahaan dalam pencapaian tujuan dengan cara memberikan penambahan

nilai dengan menyesuaikan penerapan Teknologi Informasi (TI) dalam proses bisnis perusahaan (Kaban, 2009).

Teknologi Informasi telah menjadi tema manajemen pengelolaan bukan lagi sekedar isu teknologi. Hal ini membuat perlunya pengelolaan teknologi informasi yang baik layaknya aset-aset perusahaan. Untuk mendukung penerapan TI yang baik maka perlu ditunjang dengan sistem pengelolaan TI (IT Governance) yang baik pula, dari mulai perencanaan hingga pengimplementasian teknologi informasi Kaban (2009). Untuk melakukan pengaplikasian teknologi informasi diperlukan sebuah kerangka kerja yang mampu organisasi untuk memperbaiki tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan standar tata kelola TI (Hardinata et al., 2019).

Dalam penelitiannya Kaban, (2009) menjelaskan bahwa, penerapan IT Governance yang kurang memadai akan menjadi awal terjadinya masalah bagi sebuah organisasi seperti (1) kerugian usaha, reputasi menurun dan menurunnya posisi kompetisi; (2) tenggang waktu yang terlampaui, pembengkakan biaya dari yang dianggarkan, dan kualitas yang lebih rendah dari yang diantisipasi; (3) efisiensi dan proses utama perusahaan berjalan negatif karena rendahnya kualitas penggunaan TI; (4) kegagalan inisiatif TI untuk menciptakan inovasi atau mendatangkan manfaat yang di janjikan.

Model IT Governance yang banyak digunakan saat ini, yaitu 1) The IT Infrastructure Library (ITIL) 2) ISO/IEC 17799 (The International Organization for Standardization/The International Electrotechnical Commission) 3) COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission), dan 4) COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology).

Audit IT

Model akuntansi pada era TI mengharapkan bahwa model akuntansi dapat mengukur tingkat perubahan sumberdaya, tingkat perubahan proses, mengukur aktiva tetap tak berwujud, memfokuskan ke luar pada nilai pelanggan, mengukur proses secara realtime, dan memungkinkan networking. Perubahan proses akuntansi karena perkembangan TI akan mempengaruhi proses audit yang merupakan bidang praktik akuntansi yang menggunakan laporan keuangan sebagai objek (Elisabeth, 2019).

Audit teknologi informasi merupakan kegiatan para auditor untuk memanfaatkan keahlian dan pengetahuan teknis untuk menyelenggarakan audit dengan sistem komputerisasi, juga merupakan penyediaan layanan audit dimana proses atau data atau keduanya melekat dalam berbagai teknologi (Hardinata et al., 2019).

Terdapat enam alasan mengapa dilakukannya audit teknologi informasi, yaitu (1) kerugian akibat kehilangan data; (2) kesalahan mengambil keputusan; (3) risiko kebocoran data; (4) penyalahgunaan komputer; (5) kerugian akibat kesalahan proses perhitungan, dan (6) tingginya nilai investasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer (Elisabeth, 2019).

Dalam SAS (Statement on Auditing standard) 48, dalam memeriksa keuangan yang disusun dengan komputerisasi maka auditor (1) auditor harus mempertimbangkan metode-metode yang dipergunakan oleh organisasi dalam pemrosesan informasi akuntansi sebelum merancang audit; (2) auditor harus mempertimbangkan apakah keterampilan khusus diperlukan untuk menilai pengaruh pemrosesan komputer terhadap pemeriksaan, auditor harus memahami arus transaksi dan sifat prosedur pengendalian akuntansi internal untuk merancang dan melaksanakan proses audit (Setiatin, 2018).

Penggunaan TI dapat meningkatkan tata kelola organisasi dengan memasukkan langkah pengendalian baru yang dilakukan oleh komputer dan dengan menggantikan kendali manual yang merupakan sumber kesalahan dan kelalaian manusia. Peningkatan tata kelola sebagai hasil pengintegrasian TI ke dalam sistem akuntansi perusahaan adalah (1) kendali komputer menggantikan kendali manual, salah satu keunggulan penerapan TI adalah daya untuk meningkatkan tata kelola dengan meningkatkan pengendalian internal dengan cara menggabungkan kendali yang dilakukan komputer dalam aktivitas organisasi; (2) tersedianya informasi yang lebih berkualitas, lingkungan TI yang kompleks akan diatur secara efektif karena kompleksitas memerlukan pengaturan yang lebih efektif, prosedur dan dokumentasi sehingga informasi yang tersedia bagi manajemen lebih bermutu.

METODE PENELITIAN

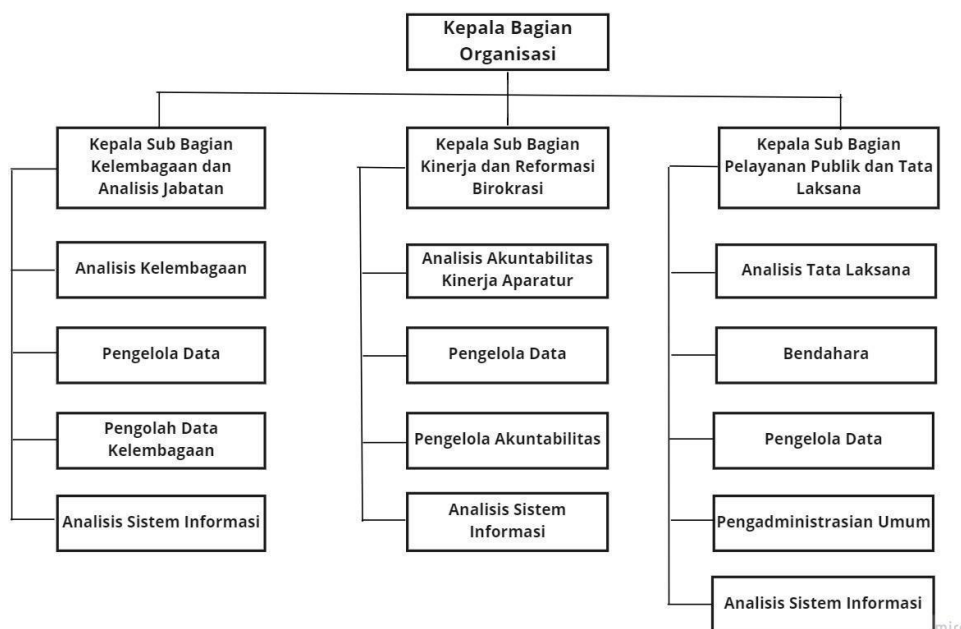
Penelitian ini merupakan studi literatur, yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk menggali data dan informasi tentang isu dan topik-topik terbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji isu- isu berbagai penelitian khususnya terkait topik Good Corporate Governance Indonesia. Pada penelitian ini ditetapkan bahwa sumber informasi berasal dari hasil penelitian terkait digitalisasi untuk Good Corporate Governance yang diambil dari berbagai situs jurnal, berita, dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dilakukan pula pencarian mengenai literatur seperti jurnal yang meneliti implementasi teknologi audit di berbagai kabupaten atau kota yang telah menerapkan.

Fokus dari penelitian ini adalah Penerapan Good Corporate Governance dari Pemerintah Kabupaten Kediri. Penelitian ini dimulai dengan menetapkan kata kunci pencarian, selanjutnya melakukan pencarian data melalui aplikasi mesin pencari yang telah ditetapkan. Selanjutnya data yang telah dicari kemudian ditelaah, dan hasil telaah dari berbagai literatur akan digunakan untuk mengidentifikasi penerapan digitalisasi di pemerintah Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Kediri

Pemerintah Kabupaten Kediri telah menerapkan Good Corporate Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada praktiknya, setiap pegawai telah memiliki divisi masing-masing agar dapat terfokus dengan pekerjaannya. Pemisahan kekuasaan ini dapat dilihat dari adanya struktur organisasi yang dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Kediri
 Sumber: KediriKab.Go.Id (2021)

Pada struktur diatas, dapat diketahui bahwa pembagian tugas didasarkan pada posisi di setiap divisi. Disini tidak ada tugas yang diberikan tidak sesuai dengan divisi masing-masing. Keberadaan struktur organisasi dapat dikatakan berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi dan juga kepuasan para pegawai (Khairiah, 2017). Selain itu, struktur organisasi yang telah didukung dengan sistem informasi yang bagus akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan manajemen (Hevi, 2013). Hal ini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi dan struktur organisasi akan mempengaruhi kinerja dari para pegawai. Budaya dari struktur organisasi juga memiliki pengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi (Akbar, 2018) dimana akuntansi memiliki peran penting dalam pelaporan pertanggungjawaban dari realisasi anggaran keuangan pemerintahan. Se jauh ini, penerapan struktur organisasi yang sedemikian rinci akan menciptakan kinerja yang baik serta dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan. Hal ini didukung pula dengan kepemimpinan, budaya organisasi yang ditanamkan serta kinerjanya (Hadian, 2015). Disamping itu, sistem informasi akuntansi dikatakan dapat meningkat dengan kemampuan internal control yang memadai. Internal control ini juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan dari pembagian tugas yang dilaksanakan oleh setiap divisi menurut struktur organisasi (Rachmawati, 2016).

Transparansi dan Akuntabilitas

Berdasarkan prinsip ini, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri tidak menyembunyikan laporan keuangannya. Pemerintah tidak lupa untuk melaporkan kepada media agar informasi mengenai pertanggungjawaban laporan keuangan dapat disampaikan ke masyarakat. Sehingga, tidak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Kediri juga mampu selama empat periode berturut-turut mendapatkan hasil audit wajar tanpa pengecualian berdasarkan tahun anggaran 2019 (Dinas Kominfo, 2020). Hal ini juga selalu disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui apakah anggaran yang disalurkan kepada tiap

kabupaten telah digunakan dan dilaporkan secara semestinya. Transparansi dapat terwujud apabila pemerintah daerah rutin dalam menyampaikan dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah serta diterimanya partisipasi aktif dari masyarakat (Rahmanurrajjid, 2008). Laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK ini merupakan perwujudan dari transparansi APBD. BPK akan menilai implementasi proyek dari Pemerintah terkait standar akuntansi, pengungkapan, dan kepatuhan pada peraturan undang-undangan serta efektivitas dari sistem pengendalian internal yang berjalan.

Setelah tahun anggaran berakhir, evaluasi harus dilakukan pihak manajemen untuk mengetahui seberapa efektif pemanfaatan sumber daya dan aset yang disalurkan. Pemerintah Kabupaten Kediri dinilai mampu konsisten dan tepat waktu dalam menyusun laporan keuangan begitupun instansi- instansi dibawahnya. Transparansi dan akuntabilitas ini dapat mendorong pembangunan karena timbulnya rasa saling percaya antara masyarakat dan pihak pemerintahan. Dari sisi administrasi, ketika transparansi dan akuntabilitas tidak didampingi dengan kepatuhan pada hukum maka akan menurunkan kualitas pembangunan masyarakat (Kumalasari, D., & Riharjo, 2016). Tidak hanya pada tingkat pemerintahan atas, melainkan pada tingkat desapun sudah mengedepankan asas transparansi. Misalnya pada Desa Purwoasri dimana kegiatan, rapat, pengumuman kepada masyarakat, rencana pembangunan dan pengeluaran semua ditempelkan di depan papan pengumuman kantor (Suharyati, A. H. T., & Rahmawati, 2021). Dari sini kita tahu bahwa setiap orang dipastikan tahu proyek desa dan penggunaan anggarannya tanpa ditutup-tutupi.

Keadilan (Fairness)

Keadilan adalah situasi dimana semua pemerintah akan memenuhi semua kepentingan masyarakat dan para pegawainya dengan wajar. Setiap orang berhak untuk menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Kediri selama mendaftar menjadi pegawai saat recruitment. Selain itu, apabila ingin menjadi bagian dari anggota DPRD, maka diharuskan memenangkan PEMILU. Sehingga, tidak ada yang namanya membawa hubungan kekerabatan dapat meningkatkan kemungkinan diterima menjadi pegawai ataupun anggota DPRD dan pejabat tinggi. Selain itu, kegiatan program pemerintah telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021 yang menjalankan program berdasarkan prinsip keadilan seperti; 1) Ketahanan ekonomi demi pertumbuhan yang adil dan berkualitas, 2) Mengembangkan wilayah demi mengurangi adanya kesenjangan, 3) Meningkatkan kualitas SDM, 4) Pembangunan Berkebudayaan dan Revolusi Mental, 5) Pemerataan infrastruktur ekonomi dan pelayanan masyarakat, 6) Menciptakan lingkungan hidup yang tahan bencana dan adanya perubahan iklim, dan 7) Menstabilkan transformasi pelayanan terhadap masyarakat dan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (RKPD, 2021).

Independensi (Independency)

Independensi telah diterapkan dengan baik pada pemerintahan. Ketika auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan akan melakukan pemeriksaan, tidak ada permasalahan conflict of interest. Auditor external ini merupakan auditor yang independen yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan pemerintah Kabupaten Kediri. Bupati bersifat terbuka, aktif, dan kooperatif dalam proses audit dari BPK. Dengan adanya keindependensian ini maka akan mencegah terjadinya fraud sedangkan disisi lain, laporan audit akan menghasilkan laporan yang memberikan opini sesuai kenyataannya. Laporan keuangan yang telah diaudit ini akan digunakan sebagai dasar dalam

pengambilan keputusan. Pada saat mengaudit, BPK memiliki wewenang penuh dalam menjangkau seluruh program yang telah didanai anggaran untuk diperiksa. Setelah itu, diperoleh laporan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi mengenai tindakan yang berjalan sesuai dengan tujuan dan program yang dirasa belum efisien. Namun, tidak lupa dipertimbangkan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil dari rekomendasi temuan BPK, segera ditindaklanjuti Kabupaten Kediri sehingga pengelolaan keuangan kedepannya dapat meningkat lebih baik daripada tahun sebelumnya.

Tanggung Jawab (Responsibility)

Praktik pemerintahan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitupun juga instansi-instansi dibawahnya. Organisasi Pemerintah harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan pemerintah harus bertindak sesuai kebutuhan dan suara rakyat. Selain melaporkan pertanggungjawaban ke Gubernur, pemerintah juga tidak boleh menutupi dana APBD dicairkan untuk pendanaan apa saja. Dalam realisasi anggaran, pemerintah mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan, selain itu Pejabat yang bertugas sebagai pengelola informasi dan dokumentasi Kabupaten Kediri juga memberikan pelayanan informasi mengenai berbagai kegiatan pelayanan publik.

Digitalisasi Keuangan Pemerintahan Kabupaten Kediri

Pencatatan keuangan oleh masing-masing wilayah Kabupaten Kediri memanfaatkan perangkat komputer dengan mengaplikasikan cloud accounting. Dengan kemajuan teknologi yang disertai dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dalam realisasinya, pemerintah kabupaten Kediri telah memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, melalui cloud accounting, pemerintah juga dapat meninjau secara langsung atas kinerja perangkat pemerintahan terhadap laporan keuangan yang telah disusun dan dilaporkan secara otomatis (Liang, et al., 2017). Guna membangun pengawasan atas laporan keuangan yang lebih efektif, Kabupaten Kediri juga turut menerapkan E-Audit menggunakan software yang dikembangkan oleh BPK RI sebagai auditor eksternal pemerintahan (BPK, 2012). Melalui E-Audit, pemerintah kabupaten Kediri dapat memudahkan kinerja BPK dalam membandingkan secara sistemik antara laporan keuangan yang dilaporkan dengan yang dibuat oleh kementerian dan lembaga (Kontan, 2014). Laporan kinerja dan keuangan pemerintahan kemudian diintegrasikan dan disajikan dalam platform digital berupa website resmi Kabupaten Kediri. Dalam optimalisasi pemeriksaan kinerja pemerintahan, berikut akan kami bahas penerapan digital terkait pelaporan keuangan kabupaten Kediri.

E-SAKIP

Sistem komputasi E-SAKIP melalui website kabupaten Kediri telah mencakup seluruh Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam mengukur kinerja pemerintahan. Melalui laporan RENJA, RENSTRA, PAK, dan LKPD yang dimuat secara elektronik, pemerintah dapat mempersingkat proses pemantauan dan pengendalian kinerja dan keuangan pada setiap periode. Dibandingkan dengan E-SAKIP pada kabupaten lainnya (Kab. Demak, Situbondo, Karangasem, Muara Enim), kelemahan dari E-SAKIP kabupaten Kediri masih belum mengungkapkan alur evaluasi SAKIP. Selain itu, tampilan yang kurang menarik serta keamanan data belum terjamin juga menjadi kelemahan bagi E-SAKIP kabupaten Kediri. Pengunjung tidak diharuskan untuk melalui proses login untuk dapat

mengakses informasi terkait SAKIP oleh masing-masing SKPD. Akan tetapi dengan keterbukaan terhadap dokumen laporan juga dapat menjadi keunggulan yang tidak membatasi pengguna informasi untuk dapat sekaligus menjadi evaluator bagi kekurangan dari portal web ini.

E-Survey

Sebagai perwujudan dari prinsip transparansi, pemerintah kabupaten Kediri memberikan fasilitas survey terhadap beberapa kategori yaitu kepuasan masyarakat, persepsi korupsi, integritas organisasi, dan kinerja inspektorat. Sejak pertengahan tahun 2020, indeks persepsi korupsi kabupaten Kediri rata-rata mencapai 3,52 yang dapat dimaknai bahwa masyarakat tidak mendukung dan sadar untuk berupaya dalam pencegahan perilaku korupsi. Nilai terendah terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 dimana angka indeks hanya mencapai 3,23 atau 85% menurun dibandingkan dengan bulan Juli 2021 yang memiliki nilai tertinggi yaitu 3,71 (Kabupaten Kediri, 2022). Melalui survey ini, pemerintah diuntungkan dalam pendeteksian kecurangan dini dari sisi korupsi pada seluruh SKPD. Selain itu, pengukuran performa pelayanan publik juga dapat dilakukan sebagai langkah evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Batas nilai indeks yang sangat baik ada di angka 5, sehingga apabila belum mencapai angka tersebut, tentu ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Hal ini umumnya disebabkan oleh beberapa kendala yang dialami oleh masyarakat dalam menerima manfaat dari sistem e-government seperti stabilitas jaringan dan aplikasi, kecanggihan teknologi, maupun keterampilan dalam penggunaannya (Shareef et al., 2011). Penelitian lebih lanjut menggunakan heuristic evaluation menemukan adanya 23 masalah usability pada aplikasi E-Kinerja Kab. Kediri yang umumnya merupakan kekurangan terhadap desain dan fitur yang disediakan (Pradana, dkk., 2020) sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran pada kemungkinan kecurangan.

Dana Hibah dan Bansos

Disajikan secara terpisah, website resmi kabupaten Kediri juga mengungkapkan laporan dana hibah dan bantuan sosial yang dikeluarkan pada setiap periode kerja. Merujuk pernyataan Ketua BPK, Hadi Poernomo, sistem E-Audit dapat mempermudah pemeriksaan belanja hibah dan bantuan sosial serta mempercepat pendeteksian indikasi penyimpangan pada saat di lapangan (Kontan, 2014). Pusat data laporan dana hibah dan bansos kabupaten Kediri memuat laporan dari beberapa SKPD yang menyelenggarakan bantuan sosial pada periode tertentu. Kelemahan dari penyajian data ini adalah kurangnya kesadaran untuk memperbaharui laporan secara digital dari setiap perangkat pemerintahan sehingga belum mencakup semua dan masih terbatas pada tahun 2017 saja (Kabupaten Kediri, 2022).

Analisis SWOT

Strength

Penyelenggaraan E-Audit diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemeriksaan keuangan serta deteksi salah saji sehingga akan mengurangi terjadinya kesalahan pengambilan keputusan. Selain itu technology audit akan memiliki kapasitas penyimpanan data yang besar sehingga mempermudah dalam proses pemeriksaan laporan keuangan dan juga pencarian bukti-bukti transaksi. Hal ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya fraud. Dengan pengendalian internal yang bagus maka pihak-pihak yang berusaha melakukan penyelewangan kekuasaan akan lebih berpikir dua kali karena lebih mudah tertangkap bukti serta penyidik dapat berasal dari BPK. Selain itu, penggunaan teknologi informasi ini juga akan membantu pekerjaan dari pihak

penyusun laporan keuangan dan juga pemeriksa laporan keuangan. Sebab, efisiensi akan meningkat yang didukung pula dengan peningkatan kinerja pegawai (Akib, 2020).

Weakness

Namun, teknologi audit yang tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni akan mempersulit dalam pemanfaatan teknologi dan juga pemanfaatan sistem pencatatan akuntansi dengan komputer. Selain itu, terkadang masih kemampuan teknik audit berbasis komputer masih kurang dipahami (BPK Jawa Timur, 2012). Permasalahan ini dapat pula mempengaruhi suatu organisasi sehingga dampaknya akan terasa padahal dengan adanya teknologi maka semua aktivitas akan berjalan dengan lancar dan lebih efisien.

Opportunity

E-Audit ini akan memperkecil kemungkinan adanya penggelapan dana dan tindakan fraud di dalam pemerintahan. Selain pekerjaan lebih mudah dan efisien, pihak manajemen lebih mudah dalam melakukan monitor kinerja serta pemeriksaan berbagai aktivitas pengeluaran dana yang telah tersimpan pada komputer. Implementasi sistem ini juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud pada aset dan juga tindakan penyelewengan kekuasaan (Nugroho, 2015).

Threats

Terdapat ancaman bahwa data kemungkinan terhapus dan error system. Sehingga, diperlukan backup data agar data selalu tersimpan dengan aman. Selain itu, masih terdapat ancaman bahwa penggunaan teknologi yang tidak dapat dikembangkan dengan baik akan menimbulkan pemborosan sumber daya dan pengeluaran biaya sia-sia.

SIMPULAN

Praktik Good Corporate Governance (GCG) kabupaten Kediri didasari oleh adanya pemisahan kekuasaan melalui pengadaan sistem informasi dan struktur organisasi yang terperinci didukung dengan kepemimpinan, budaya organisasi, serta pengendalian internal. Keempat prinsip GCG telah diterapkan dengan baik oleh pemerintahan serta memperhatikan karakteristik yang disesuaikan oleh kebutuhan masyarakat. Hasil nyata yang diperoleh adalah kemampuan mendapatkan hasil audit wajar tanpa pengecualian selama empat periode berturut-turut. Pemerintah tidak menyembunyikan laporan keuangan dari khalayak umum karena sudah menjadi budaya masyarakat Kabupaten Kediri untuk mengedepankan asas transparansi. Selain itu, prinsip keadilan tercermin pada program pemerintah yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Independensi dalam melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah juga telah diterapkan dengan baik sehingga praktik pemerintahan juga sekaligus memenuhi prinsip tanggung jawab. Dalam realisasi anggaran, pemerintah mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan.

Pengendalian intenal ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi dalam proses hingga pelaporannya. Pemerintahan kabupaten Kediri turut berpartisipasi dalam penggunaan E-Audit serta mengembangkan aplikasi E-Kinerja yang mengungkapkan pelaporan kinerja perangkat pemerintahan secara keseluruhan melalui website resmi. Sistem komputasi E-SAKIP, E-Survey, serta pengungkapan alokasi dana hibah dan bansos melalui portal digital meningkatkan efisiensi pemerintah dalam melaksanakan pengawasan serta pengendalian kinerja dan keuangan

Kabupaten Kediri. Realisasi penggunaan E-SAKIP masih memiliki kekurangan yang ditutup dengan sedikit kelebihan jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lainnya. Kemudian sebagai perwujudan dari prinsip transparansi, pemerintah kabupaten Kediri memberikan fasilitas survey berbasis elektronik untuk melacak kekurangan ataupun kecurangan yang mungkin terjadi dalam pemerintahan. Sedangkan pusat data laporan dana hibah dan bansos kabupaten Kediri memuat laporan dari beberapa SKPD yang menyelenggarakan bantuan sosial pada periode tertentu.

Setelah dilakukan analisis SWOT, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaran E-Audit dapat mengurangi kemungkinan terjadinya fraud dengan pengendalian internal yang memadai. Namun, masih terdapat kelemahan atas pemanfaatan teknologi audit yang tidak diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia. Selain pekerjaan lebih mudah dan efisien, pihak manajemen lebih mudah dalam melakukan monitor kinerja serta pemeriksaan berbagai aktivitas pengeluaran dana yang telah tersimpan pada komputer. Terakhir, penerapan digitalisasi ini memiliki ancaman bahwa data kemungkinan terhapus, terjadinya error system, serta menimbulkan pemborosan sumber daya dan pengeluaran biaya yang sia-sia. Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi terhadap kekurangan dan kelemahan yang masih melekat pada penerapan digitalisasi akuntansi baik dari segi sistem maupun kelengkapan dan keamanan data yang disajikan. Penelitian ini diharapkan dapat menunjang kebutuhan informasi dasar serta bahan evaluasi untuk membenahan sistem pemerintahan digital baik bagi Kabupaten Kediri maupun kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adelin, V. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada BUMN di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(3). <https://doi.org/10.1190/segam2013-0137.1>

Akbar, T. . (2018). PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN STRUKTUR ORGANISASI TERHADAP KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI DENGAN KUALITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada Baitulmaal Wattamwil (BMT) di DKI Jakarta). *Jurnal Profita*, 11(1), 120–138. <https://doi.org/10.22441/profita.v11.01.009>

Akib, B. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Kota Palopo. 145–159.

Andypratama, L. W., & Mustamu, R. H. (2013). Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada perusahaan keluarga: Studi deskriptif pada distributor makanan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 1(1), 1–11.

Anggayana, I. P. N., & Wirajaya, I. G. A. (2019). Pengaruh prinsip-prinsip good governance dan budaya organisasi terhadap kinerja keuangan lembaga perkreditan Desa Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 298(1), 325–341.

BPK Jawa Timur. (2012). Ketua BPK RI Pantau Pelaksanaan E-Audit di Jawa Timur. *Jatim.Bpk.Go.Id*, <https://jatim.bpk.go.id/dari-bpk/ketua-bpk-ri-pantau-pelaksanaan-e-audit-di-jawa-timur/>

BPK. (2012). Ketua BPK RI Pantau Pelaksanaan E-Audit di Jawa Timur. Web resmi BPK RI, [https://jatim.bpk.go.id/dari-bpk/ketua-bpk-ri-pantau-pelaksanaan-e-audit-di-jawa-timur.](https://jatim.bpk.go.id/dari-bpk/ketua-bpk-ri-pantau-pelaksanaan-e-audit-di-jawa-timur/)

Dinas Kominfo. (2020). Opini WTP, Wujud Transparansi Pengelolaan Keuangan. Dinas Kominfo Kab. Kediri. (Online). <https://berita.kedirikab.go.id/baca/2020/06/opini-wtp-wujud-transparansi-pengelolaan-keuangan>. Diakses pada 11 April 2022

Eko Sudarmanto. (2020). Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 107–121.

Elisabeth, D. M. (2019). Kajian terhadap peran teknologi informasi dalam perkembangan audit komputerisasi (Studi kajian teoritis). *Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi*, 3(1), 40–53. <https://doi.org/10.46880/jmika.Vol3No1.pp40-53>

Hadian, D. (2015). Pengaruh Kepemimpinan, Struktur Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Dinas serta Implikasinya pada Pelayanan Publik. *Kontigensi : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1), 26–43.

Hevi, H. J. (2013). Pengaruh Struktur Organisasi dan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Pengambilan Keputusan Manajemen. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.

Hardinata, S., Fitriani, W., Pramono, C., Muttaqin, M., Ritonga, husni muharam, Marlina, L., Suheri, S., & Haliq, A. (2019). Audit tata kelola teknologi informasi menggunakan Cobit 5. *Jurnal Teknik Dan Informatika*, 6(1), 42–45.

Kaban, I. E. (2009). Tata kelola Teknologi Informasi (IT Governance). *CommIT (Communication and Information Technology) Journal*, 3(1), 1–5. <https://doi.org/10.21512/commit.v3i1.505>

Kabupaten Kediri. (2002). Survey Kabupaten Kediri, <https://e-survei.kedirikab.go.id/>.

Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(1), 1–9.

Kalau, A. A., & Leksair, S. Z. (2020). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Perilaku Tidak Etis terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara di Ambon). *Cita Ekonomika*, 14(2), 99–110.

Khairiah, K. (2017). PENGARUH STRUKTUR ORGANISASI (ORGANIZATIONAL STRUCTURE), KEPUASAN KERJA (JOB SATISFACTION) TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI (ORGANIZATIONAL COMMITMEN) PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU. *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, 10(1).

Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11), 1–15.

Kurniawan, G. (2013). Pengaruh Moralitas, Motivasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD di Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*, 1(September), 3.

Laoli, N. & Setiawan D. (2014). Ini 5 Manfaat e-audit BPK untuk keuangan negara, *Kontan*, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-5-manfaat-e-audit-bpk-untuk-keuangan-negara>.

Liang, Y. et al. (2017). Exploring the determinant and influence mechanism of e-Government cloud adoption in government agencies in China. *Government Information Quarterly*, 34(3), 481–495, [doi:10.1016/j.giq.2017.06.002](https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.06.002).

Manossoh, H. (2015). Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Government Governance Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 777–789.

Marlina, E., Rahmayanti, S., & Putri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 89–100. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517>

Muslih, M., Rahadi, dedi rianto, & Marbun, serina oktavia. (2021). Tata kelola pemerintahan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah. *Konverensi Nasional Ilmu Administrasi*, 1–7. <http://180.250.247.102/conference/index.php/knia/article/view/143>.

Nugroho, R. S. (2015). Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(11), 1905–1911.

Nurillah, A. S., & Muid, D. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–13.

Organisasi, B. (2021). Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Kediri. *KediriKab.Go.Id.* (Online) <https://bagianorganisasi.kedirikab.go.id/halaman/detail/struktur-organisasi>. Diakses pada 11 April 2022

Pradana, N. D., Wijoyo, S. H., Perdanakusuma, A. R. (2020). Evaluasi Usability dan Rekomendasi Perbaikan pada Aplikasi E-Kinerja Kabupaten Kediri menggunakan Metode Heuristic Evaluation. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 4(4), 1265-1272, <http://j-ptiik.ub.ac.id>.

Prasinta, D. (2012). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), 1–7.

Rachmawati, R. (2016). Struktur Organisasi, Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Manajemen. *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 6(1).

Rahmanurrasjid, A. (2008). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DAERAH (Studi di Kabupaten Kebumen).

Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2018), 8–17.

Retno, R. D., & Priantinah, D. (2012). Pengaruh good corporate governance dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 84–103. <https://doi.org/10.21831/nominal.v1i2.1000>.

Setiatin, T. (2018). Dampak teknologi informasi pada proses audit. *Jurnal Ekonomak*, 4(2), 58–72. <http://ejournal.stiepgri.ac.id/index.php/ekonomak/article/view/72>.

Shareef et al. (2011). e-Government Adoption Model (GAM): Differing service maturity levels.

Government Information Quarterly, 28, 17-35, doi:10.1016/j.giq.2010.05.006.

Sofa, K., Suryanto, T. lathif mardi, & Suryono, ryan randy. (2020). Audit tata kelola teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COBIT 5 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTSI)*, 1(1), 39–46.

Suharyati, A. H. T., & Rahmawati, M. I. (2021). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi pada Desa Klampitan di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(8), 456–469.

Taufik, otong husni, Yuliani, D., & Hermawandi, D. (2019). Tata kelola pemerintah desa berbasis e- government menuju good governance. *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 145–152. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v6i1.1987>.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri

Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan BAPPEDA (2021). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021